

KONFLIK INTERNAL PPP DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI JAWA BARAT 2018 DAN PENYELESAIANNYA

Sayyid Muh. Suparman¹ Muradi², Mudiwati Rahmatunnisa³

*Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Padjadjaran University, Jatinangor,
Indonesia*

¹ s.m.suparman27@gmail.com

ABSTRACT

During a regional head election, it is a common situation that a party faces political conflict in the electoral area, including conflict among the cadres as well as the supporting parties that merged. By using qualitative analysis, this study explores the internal polemic of the West Java United Development Party (DPW PPP) Regional Executive Board in the form of dualism in the interest of submitting candidates for the West Java Governor Election (Jabar Pilgub) where both camps claim to have legality to advance their candidates for the 2018 Gubernatorial Election. The conflict resolutions produced by PPP can be divided into three, namely: First, Right-base or legally the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which concludes that there is only one-party leadership, namely under the leadership of General Chair HM Romahurmuziy and Secretary General H Aunur Rofik. The second is power-based or there are two powers, namely central power with Romahurmuziy's personal approach to the head of government, the second is the internal approach of senior party figures. Third, Interest-based, a participatory choice in politics on the opposite side by embracing and inviting rejoining with the consequence of supporting the other side.

Keywords: *Dualisme, PPP, West Java, Regional Election*

PPP INTERNAL CONFLICT DURING 2018 ELECTION OF REGIONAL HEAD IN WEST JAVA AND ITS SETTLEMENT

ABSTRAK

Dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah umumnya terdapat dinamika yang meliputi situasi politik di wilayah pemilihan, para kader, maupun partai-partai pengusungnya. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi polemik di internal Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jabar berupa dualisme dalam kepentingan pengajuan calon Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) dimana kedua kubu saling mengklaim memiliki legalitas untuk memajukan calonnya di Pilgub 2018. Resolusi konflik yang dihasilkan PPP dapat dibagi kedalam tiga yaitu: Pertama *Right-base* atau secara hukum keluarnya Keputusan yang di rilis Menteri Hukum dan HAM RI yang menyimpulkan hanya ada satu kepemimpinan partai yakni di bawah pimpinan Ketua Umum HM Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal H Aunur Rofik. Kedua *power-based* atau kekuasaan ada dua yaitu kekuasaan pusat dengan pendekatan personal Romahurmuziy kepada kepala pemerintah, kedua pendekatan internal tokoh-tokoh senior partai. Ketiga *Interest-based*, sebuah pilihan partisipatif dalam berpolitik di kubu yang berseberangan dengan merangkul dan mengajak bergabung kembali dengan konsekuensi mendukung kubu yang lain.

Kata kunci: Dualisme, PPP, Jawa barat, Pemilihan Umum Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, di Indonesia diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak untuk pemilihan Gubernur dan wakilnya. Salah satu Provinsi yang terlibat pada perhelatan ini adalah Jawa Barat. Pada perhelatan pilkada ini tidak terlepas dari adanya dinamika termasuk salah satunya dinamika yang terjadi ditubuh Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP). Dinamika ini terjadi di tubuh Dewan Pengurus Wilayah PPP (DPW PPP) Jabar tentang diputuskannya Uu Ruzhanul Ulum

sebagai calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil.

Sebelum adanya dinamika ini, ditubuh DPP PPP sudah terjadi dikotomi yang membuat PPP terpecah menjadi dua kubu dengan dua ketua umum yang berbeda. Dualisme yang ada di pusat ini selanjutnya juga menyebabkan terjadinya dualisme ditingkat wilayah dimana masing-masing pihak merasa mempunyai legalitas untuk memajukan calonnya termasuk pada perhelatan Pilgub Jabar. Ridhoi (2018), mengatakan bahwa PPP secara institusi telah resmi mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Uum (Rindu), sedangkan posisi Farkhanul Hakim sebagai ketua DPW PPP Jabar kubu Djan

* Corresponding Author

E-mail: s.m. suparman27@gmail.com

Faridz mendukung pasangan Sudrajat dan Syaikh. ¹ Qoyum Abdul Jabar selaku Wakil Sekjen PPP pada Muktamar Surabaya, mengatakan bahwa konflik internal ditubuh partai PPP sudah terjadi sejak lama. ² Konflik ini bermula sejak pilpres 2014. Status Suryadharma Ali sekaligus statusnya sebagai tersangka KPK pada saat itu menyebabkan keresahan ditubuh PPP, hingga terusulnya nama Romahurmuziy dan Djan Faridz yang menjabat ketua umum yang baru. Namun secara sah yang diakui oleh KPU adalah Romahurmuziy.

Beberapa nama yang diajukan untuk mendampingi Ridwan Kamil yaitu Saan Mustofa dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Imanul Haq dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, dalam pandangan Romahurmuziy, Uu lebih unggul karena sudah teruji menjadi Bupati Tasikmalaya selama dua periode dan juga sudah aktif bergerak cukup lama untuk pilkada Jawa Barat. ³ Berdasarkan survei yang dirilis eLSID (Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi) pada 30 November sampai dengan 8 Desember 2017 dengan 630 responden yang tersebar di wilayah Jawa Barat, juga menunjukkan bahwa Uu menempati urutan teratas.

Berbeda dengan kubu Romahurmuziy yang mendukung Uu, kubu Djan Faris yang diwakili oleh Tatang Farkhanul Hakim menyatakan mendukung pasangan Sudrajat-Saikh. Dukungan ini merupakan bentuk tidak setuju atas ketetapan pemerintah yang tidak mengakui Djan Faridz sebagai ketua umum PPP. Kubu Djan mengatakan telah merilis Surat Keputusan dukungan kepada Sudrajat-Syaikh dan juga beberapa calon kepala daerah dalam Pilkada 2018, Surat Keputusan ini diklaim sah oleh kubu Djan karena putusan Mahkamah Agung Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016, pada 12 Juni 2017 yang mengakui kepemimpinan PPP Romahurmuziy menurutnya masih perlu ditinjau ulang.

Namun, Wasekjen DPP PPP kubu Romahurmuziy, Ahmad Baidowi menyatakan PPP solid mendukung pasangan Rindu dan dukungan yang ditandangi oleh Ketua Umum Romahurmuziy lah yang sah. Hal ini sekaligus menjadi pernyataan bantahan adanya dualisme ditubuh PPP. Baidowi juga menyatakan bahwa PPP akan mengambil langkah hukum terhadap oknum yang menggunakan atribut PPP secara ilegal. ⁴

Hal yang menarik pada akhirnya adalah ditengah adanya konflik dan juga dualisme kepemimpinan yang terjadi di tingkat pusat PPP, DPW PPP Jawa Barat pada Pilgub Jabar 2018 memastikan bahwa seluruh unsur PPP

memberikan dukungan untuk memenangkan pasangan Rindu. Berbagai upaya dilakukan oleh DPP dan juga DPW PPP Jabar untuk mengatasi konflik internal tersebut, diantaranya resolusi konflik berupa mediasi, upaya hukum, dan juga islah.

Upaya mediasi konflik internal PPP antara kubu Romy dan Djan Faridz telah dilakukan tahun 2015 oleh Abdul Latief selaku mantan menteri tenaga kerja, namun pertemuan tersebut batal dikarenakan Djan Faridz tidak ingin mengadakan pertemuan. Selanjutnya pada tahun 2016 dimediasi oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie, sebanyak dua kali, namun mediasi ini lagi-lagi gagal karena pihak Djan Faridz yang akan ditemui oleh Rommy pergi. Masih pada tahun yang sama, dimediasi oleh Jusuf Kalla tetap berakhir gagal karena pihak Djan Faridz tidak bisa datang. ⁵

Upaya hukum juga ditempuh untuk menyelesaikan konflik internal PPP dimana pihak Rommy melakukan gugatan perdata sengketa partai politik yang pada akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah konstitusi. Dengan adanya putusan PK ini, seluruh dualisme kepemimpinan PPP yang telah berlangsung dalam kurun waktu 2,5 tahun dianggap berakhir, dimana putusan Kasasi nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan Djan Faridz teranulir, dan berdasarkan Putusan Nomor 58 B/2017/PTTUN Jakarta tanggal 6 Juni 2017 Rommy menang di Pengadilan Tinggi TUN. Gugatan Perdata sengketa partai politik yang diajukan oleh Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 dibawah pimpinan M. Romahurmuziy diterima oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. ⁶

Upaya islah yang merupakan langkah kooperatif juga dilakukan oleh PPP. Menurut Ketua DPW PPP Jawa Barat, menangnya pasangan Rindu pada Pilkada Jabar 2018 juga menjadi indikasi adanya islah terbatas yang dilakukan oleh DPW Jabar dimana seluruh unsur PPP mendukung kemenangan pasangan Rindu.

Peneliti-peneliti sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian semacam ini diantaranya Asmadinto dan Nurmandi (2015) dengan judul "*Konflik Internal dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat (Studi Kasus: Konflik Internal dan Keterpilihan Kader dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat 2014)*". Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penyebab konflik adalah dinon-aktifkannya ketua DPD I Golkar oleh pengurus DPP yang diperpanas oleh hadirnya Nurdin Halid selaku Pelaksana Tugas (PLT). Selain itu, beberapa daerah kabupaten memaksa pengurus melakukan penjarangan figur untuk mendukung kemenangan Pilkada karena sebagian pengurus DPD berkesimpulan bahwa pengurus pusat tidak mempertimbangkan akibat dari dikeluarkannya Anwar oleh pengurus DPP yang berdampak terhadap elektabilitas kader. Selanjutnya Irawati (2016) dalam "*Analisis*

¹ Ridhoi, Ahsan. 2018. *Siapa Kader PPP yang Diklaim Sudrajat Saat Debat Pilgub Jabar?*. Melalui <<http://tirto.id/siapa-kader-ppp-yang-diklaim-sudrajat-saat-debat-pilgub-jabar-cF9b>> [1/2/2019]

² Waskita, Ferdinand. 2018. *Politisi PPP Ungkap Kronologi Perpecahan di Partainya*. Melalui <<https://nasional.kompas.com/read/2015/04/13/0123/Politisi.PPP.Ungkap.Kronologi.Perpecahan.di.Partainya>> [4/6/2018]

³ Wulandari, F. 2017. *PPP Klaim Ada Kadernya yang Layak Dampingi Ridwan Kamil Menuju Jabar*. Melalui, <<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/20/ppp-klaim-ada-kadernya-yang-layak-dampingi-ridwan-kamil-menuju-jabar-1>> [1/2/19]

⁴ Prasetya, A. 2018. *Kubu Djan Dukung Sudrajat, PPP: Itu Oknum yang Tak Laku Lagi*. Melalui <<http://news.detik.com/berita/d-3997234/kubu-djan-dukung-sudrajat-ppp-itu-oknum-yang-tak-laku-lagi>> [1/2/19]

⁵ Prihatin, Intan Umbari. 2017. *Cerita Jokowi-JK Gagal Mediasi Dua Kubu PPP*. Melalui <<https://www.merdeka.com/politik/cerita-jokowi-jk-gagal-mediasi-dua-kubu-ppp.html>> [22/7/21]

⁶ Ramadhan, Bilal. 2017. *Putusan MA, Romi: Djan Faridz Sudah Tak Berhak Lagi*. Melalui <<https://www.republika.co.id/berita/oroj30330/putusan-ma-romi-djan-faridz-sudah-tak-berhak-lagi>> [22/7/21]

Rekrutmen Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan oleh Partai Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015“. Jurnal ini berfokus pada analisis bagaimana Partai Golkar melakukan proses perekrutan calon walikota dan wakil walikota di Kota Balikpapan. Penelitian ini menganalisis persesuaian proses rekrutmen politik dengan undang-undang dan AD/ART Partai Golkar. Gambaran mengenai proses rekrutmen politik secara runut yang dilakukan oleh DPC dengan persetujuan DPP dihasilkan pada penelitian ini.

Selanjutnya Wijayanto (2016) dengan judul “*Dinamika Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah dalam Pemilu Serentak Tahun 2015: Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Wonogiri*”. Fokus jurnal ini adalah konflik internal dan rekrutmen politik yang terjadi di tubuh PDI-P dalam merekrut kandidat pilihannya sebagai calon kepala daerah Kabupaten Wonogiri. Teori yang digunakan dalam studi tersebut merupakan teori Rahat dan Hazan untuk mengkaji apa saja hal-hal yang diperlukan oleh partai politik untuk merekrut calon-calon kepala daerah. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah sebuah proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDI-P tahap demi tahap. Joko Sutopo, pada akhirnya terpilih sebagai bakal calon Bupati Wonogiri dari PDI-P karena maksimal dalam mengikuti proses dan dianggap memiliki keunggulan dibandingkan calon yang lain. Keunikan dari penelitian ini adalah sisi pandangan peneliti dalam melihat PDI-P yang pada akhirnya tidak mengusung kembali Bupati petahana Wonogiri yang merupakan calonnya.

Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah penelitian-penelitian sebelumnya lebih membahas tentang konflik internal yang terjadi pada tingkat pengurus DPW maupun DPD partai, sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis terdapat keunikan yaitu pada akhirnya DPW PPP Jawa Barat memastikan seluruh unsur PPP mendukung untuk memenangkan pasangan Rindu dan mengantarkan calon yang diusungnya yaitu Uu Ruzhanul Ulum untuk memenangkan Pilgub Jabar 2018 meskipun terjadi konflik dan dualisme kepemimpinan di tingkat pusat PPP dan berimbas juga pada pengurus DPW Jawa Barat. Topik ini sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kajian ilmu politik, karena ada unsur *power struggle*, yaitu adanya perebutan dominasi pengaruh kepengurusan DPW PPP oleh kedua kubu yang berkonflik, selanjutnya dominasi pengaruh tersebut terlembagakan menjadi satu-satunya kepengurusan yang sah dalam mengajukan calon yang diusung DPW PPP Jabar untuk mengikuti kontestasi Pilgub 2018.

Metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analitis dipakai oleh penulis dalam penelitian ini agar diketahui bagaimana upaya resolusi konflik yang terjadi di internal PPP dalam menetapkan kandidat wakil gubernur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk menjelaskan masalah yang diangkat dari fenomena sosial di tubuh internal PPP dan menarik kesimpulan pada bagian

akhir berdasarkan hasil interpretasi fenomena yang dikaitkan dengan teori. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menguraikan gambaran yang menyeluruh dan menjawab pertanyaan dari penelitian tentang Konflik dan Resolusi konflik DPW PPP dalam Pilgub Jabar 2018. Data diperoleh melalui narasumber yang memiliki kapabilitas pengetahuan terkait dinamika politik dalam internal PPP. Untuk mendukung data yang diperoleh dari narasumber dilakukan pula pencarian data-data dari perpustakaan yang sifatnya teoritis dan dokumentasi. Deskriptif analitis juga disajikan untuk mendapatkan alur penelitian secara sistematis, faktual dan tentunya saling berhubungan dengan isu yang dikaji.

Dalam menguji validitas data digunakan metode triangulasi. Dalam risetnya, Creswell, (1998) mengungkapkan bahwa triangulasi data dapat dilakukan dengan cara menghimpun data-data melalui beragam teknik dan sumber seperti literatur, dokumen, wawancara. Triangulasi digunakan sebagai langkah untuk memeriksa akurasi dan kredibilitas data yang diperoleh peneliti. Data berasal dari berbagai sumber sehingga triangulasi dilakukan agar peneliti mendapatkan pemahaman yang tinggi terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Kemudian wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berfungsi sebagai pedoman selama proses analisis dan korespondensi yang dilakukan dengan narasumber dapat memastikan bahwa peneliti tidak salah mengartikan realitas dan maksud dari narasumber mengenai kebenaran dari data yang didapatkan. Terakhir, klarifikasi dari bias, yang berpotensi timbul dari peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Peneliti mengaplikasikan dua teknik untuk memastikan reliabilitas dalam penelitian ini: (1) peneliti menyediakan rincian mengenai fokus dari penelitian yang sedang dilakukan, peran peneliti, posisi narasumber dan dasar pemilihan narasumber tersebut. (2) pengumpulan data dan analisis strategis akan dibuat dalam laporan secara rinci dan beraturan agar metode yang diterapkan dapat dilihat secara seksama, jelas dan juga akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ideologi Partai yang Tidak Kuat Menjadi Sumber Dualisme Partai PPP

Ideologi terbentuk atas dasar ide atau gagasan untuk membentuk masyarakat yang ideal. Untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut ideologi harus memiliki tiga ciri khusus. Pertama, sebuah ideologi harus bisa menjawab tiga pertanyaan dasar, yaitu siapa yang akan menjadi pemimpin, bagaimana cara untuk memilih pemimpin, dan prinsip apa yang akan menjadi pegangan mereka ketika memimpin. Kedua, ideologi memiliki banyak asas untuk melakukan propaganda atau menentang ide yang berlawanan. Ketiga, banyak aspek kehidupan yang bisa dipengaruhi oleh ideologi, misalnya pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya.⁷

Partai PPP yang merupakan salah satu partai tertua di Indonesia pernah mengalami dualisme kepengurusan di tahun 2018. Sejarah dualisme kepengurusan PPP berawal

⁷ Firmansyah. 2011, *Mengelola partai politik, Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*. Jakarta, Yayasan pustaka obor Indonesia (hal.97)

dari peristiwa pemecatan ketua umum PPP Suryadharma Ali oleh Badan Pengurus Harian karena dianggap telah melanggar AD/ART partai. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian pengurus PPP saat itu adalah dukungan Suryadharma Ali kepada Prabowo Subianto untuk maju dalam pilpres, padahal PPP sudah memilih 9 calon yang akan maju untuk pilpres dan tidak terdapat nama Prabowo di daftar tersebut. Tindakan Suryadharma Ali tersebut bisa dianggap bertentangan dengan ide atau gagasan partai PPP. Timbulnya dualisme kepengurusan menjadi sebuah tanda bahwa partai politik di Indonesia belum memiliki ideologi yang kuat sehingga mudah untuk dipecah oleh kekuasaan.

Ideologi berperan penting untuk partai politik karena dapat menjadi penentu tujuan yang akan dicapai oleh partai. Cita-cita partai politik bisa terwujud karena adanya program kerja yang dikerjakan dengan selaras. Ketika sebuah partai berkuasa, maka program kerja partai dapat menjadi sarana untuk mendistribusi nilai-nilai seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan kenyamanan untuk membentuk masyarakat yang ideal. Cita-cita tersebut menjadi dasar partai politik untuk mengambil tindakan pada setiap kebijakan yang dibuat pemerintah, termasuk keputusan kepada siapa mereka akan memberikan dukungan dan melakukan oposisi. Identitas partai akan terlihat jelas dengan melihat ideologinya, hal tersebut juga membuat partai politik menjadi lebih mudah untuk mendapatkan dukungan. Masyarakat yang memiliki keinginan sesuai dengan ideologi partai politik akan ikut bergabung karena adanya anggapan partai tersebut dapat memperjuangkan nilai-nilai yang sama dengan yang diyakininya.⁸

Tindakan Suryadharma Ali pada saat kampanye pilpres itu tidak dapat dibenarkan oleh pengurus partai PPP, karena bertentangan dengan keputusan partai sebelumnya. Suryadharma Ali yang ketika itu tidak setuju dengan keputusan DPH untuk memberhentikannya dari jabatan ketua umum beranggapan bahwa jabatan ketua umum tidak bisa dilengserkan jika bukan melalui cara muktamar. Akhirnya Suryadharma Ali mengadakan muktamar di Jakarta dan membuat kepengurusan baru untuk menggantikan dirinya yang saat itu terjerat kasus hukum dan pada akhirnya dipimpin oleh Djan Faridz. Padahal sebelum itu partai PPP yang dipimpin Emron Pangkapi telah melakukan muktamar PPP VIII di Surabaya dan memilih Romahurmuziy (Romi) sebagai ketua, sehingga pada akhirnya terbentuklah dua kepengurusan baru dalam partai yaitu kubu Djan Faridz dan Romi.

Ideologi politik bagi kader partai berperan sangat penting untuk menjaga eksistensi suatu partai. Seorang kader partai yang memiliki ideologi kuat maka akan memiliki jiwa militansi yang baik untuk partai. Sebaliknya, jika ideologi seorang kader partai lemah maka mereka akan mudah untuk berbelok ketika menghadapi sebuah masalah. Lemahnya ideologi juga bisa membuat seorang kader partai terjebak dalam kasus hukum yang

menimbulkan kerugian yang besar, karena hal tersebut mempengaruhi masyarakat untuk memiliki pandangan buruk terhadap partai dan para pengurusnya.⁹

Konflik internal dalam Partai PPP

Berdasarkan jenisnya konflik politik dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni konflik positif dan konflik negatif. Adapun konflik positif biasanya dapat diselesaikan dengan cara kesepakatan bersama yang dicapai melalui muktamar dan hal tersebut tidak memberikan ancaman terhadap keberadaan sistem politik yang sudah ada. Sebaliknya, konflik negatif dapat memberikan ancaman terhadap keberadaan sistem politik yang ada. Penyalurannya pun bisa dilakukan dengan cara seperti kudeta, revolusi dan terorisme.¹⁰

Kedua kubu sepakat untuk menyerahkan permasalahan dualisme kepada makamah partai dan konstitusi. Hasil keputusan MK mengesahkan bahwa kubu Emron mendapatkan wewenang untuk kepengurusan PPP dengan Emron sebagai ketua sementara. Setelah itu dilakukan muktamar untuk mengangkat ketua umum PPP, menggantikan Emron yang saat itu mengundurkan diri. Muktamar PPP VIII dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2014 dan Romahurmuziy dipilih sebagai ketua Umum PPP. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014, maka seluruh hasil keputusan Muktamar VIII PPP 15-17 Oktober 2014 di Surabaya telah disahkan. Keputusan berdasarkan hukum tersebut yang pada akhirnya disepakati oleh kepengurusan pusat.

Konflik yang terjadi di pusat ternyata juga berpengaruh terhadap PPP Jawa Barat, karena pada saat terjadi perpecahan ditemukan nama-nama yang menjabat di kubu Djan Faridz merupakan orang-orang yang merasakan kegagalan dalam pileg. Neng Madinah Ruhiyat sebagai narasumber membenarkan hal tersebut.

Menurut narasumber, Ibu Madinah selaku wakil ketua DPW PPP Jawa Barat bidang perempuan, prosedur penyelesaian konflik internal pertama-tama dilakukan di PPP pusat, lalu disampaikan ke DPW dan DPC. Setelah adanya keputusan bahwa kubu Romi yang menjadi pengurus sah untuk partai PPP, maka langkah selanjutnya yang dilakukan untuk mengatasi perpecahan di tingkat Jawa Barat adalah sebagai berikut.

1. Diadakannya musyawarah dengan mengundang beberap: tokoh senior dan penting yang masuk dalam struktur kepengurusan. Pada saat itu Tatang sebagai kubu dari Djan Faridz menolak untuk bergabung, sedangkan Numan memilih untuk pensiun.
2. Terdapat upaya mediasi di tingkat pusat, DPW dan DPC. Pada akhirnya sebanyak 80% struktur dan kader partai PPP bersatu kembali dan mendukung Uu

⁸ Prasetya, Imam Yudhi. 2011. Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1

⁹ Priyowidodo, Gatot. 2015. *Komunikasi Politik dan Resolusi Konflik*. Yogyakarta: Penerbit Andi (hal.92)

¹⁰ Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo

Ruzhanul Ulum untuk maju menjadi Cawagub Jawa Barat Mendampingi Ridwan Kamil.¹¹

Prosedur penyelesaian konflik internal PPP termasuk dalam resolusi konflik dengan pendekatan ketiganya, yaitu kekuasaan, hukum dan kepentingan. Pendekatan kekuasaan dilakukan oleh Romahurmuziy kepada Jokowi. Pendekatan hukum dilakukan di tingkat pusat dengan menyerahkan permasalahan melalui jalur hukum. Sedangkan pendekatan kepentingan dilakukan di tingkat wilayah dan cabang dengan menggunakan cara islah. Hal tersebut sesuai dengan teori resolusi konflik yang menyebutkan terdapat tiga pendekatan untuk penyelesaian konflik politik, yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan hukum dan pendekatan kepentingan.¹²

SIMPULAN

Kedudukan ideologi dalam partai politik merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam menentukan arah dan tujuan partai. Konflik yang terjadi di internal partai politik PPP adalah konflik positif yang penyelesaiannya ditempuh dengan jalur hukum. Sumber dari konflik ini diketahui karena adanya kemajemukan horizontal didalam partai, dan sebabnya karena kurangnya disparitas kepemimpinan, dan kurang kuatnya ideologi partai sehingga dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kekuasaan incumbent.

Resolusi konflik yang dihasilkan PPP dapat dibagi kedalam tiga yaitu: Pertama Right-base atau secara hukum keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.AH.11.01 TAHUN 2014 pada tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dengan demikian, seluruh hasil keputusan Muktamar VIII PPP 15-17 Oktober 2014 di Kota Surabaya telah disahkan yang didasarkan pada ketentuan UU Nomor 2 tahun 2008 jo. UU 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian, mulai hari ini DPP PPP hanya satu yaitu di bawah pimpinan Ketua Umum HM Romahurmuziy beserta Sekretaris Jenderal H Aunur Rofik. Kedua power-based atau kekuasaan ada dua yaitu kekuasaan pusat dengan pendekatan personal Romahurmuziy kepada Jokowi, kedua kekuatan internal PPP dalam berupaya meraih kembali kader-kader yang ada di kubu Djan dengan mengundang tokoh-tokoh yang sudah senior yang dinilai memiliki wawasan dan pengaruh yang kuat. Ketiga Interest-based, jika masih ingin berpartisipasi dalam berpolitik terutama di provinsi maka keniscayaan bagi kubu Djan Farizd, yakni dengan bergabung kembali dengan kubu Romy mendukung Uu Ruzhanul Ulum sebagai calon wakil gubernur di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah. 2011. Mengelola partai politik, Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi. Jakarta, Yayasan pustaka obor Indonesia
- Kurnia, Ahmad Doli. 2005. *Gerakan dan Pemikiran: Nasionalisme Kaum Muda, Pasang Surut Realitas Kebangsaan Kita*. Bandung: Alfabeta.
- Lazuardi, G. 2018. *Usai Perpecahan, PPP Jadikan Pemilu 2019 sebagai Sarana Konsolidasi*. Melalui <<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/04/usa-i-perpecahan-PPP-jadikan-pemilu-2019-sebagai-sarana-konsolidasi>> [1/2/2019]
- Prasetya, Imam Yudhi. 2011. Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1
- Prasetya, A. 2018. *Kubu Djan Dukung Sudrajat, PPP: Itu Oknum yang Tak Laku Lagi*. Melalui <<http://news.detik.com/berita/d-3997234/kubu-djan-dukung-sudrajat-ppp-itu-oknum-yang-tak-laku-lagi>> [1/2/19]
- Prihatin, Intan Umbari. 2017. *Cerita Jokowi-JK Gagal Mediasi Dua Kubu PPP*. Melalui <https://www.merdeka.com/politik/cerita-jokowi-jk-gagal-mediasi-dua-kubu-ppp.html> [22/7/21]
- Priyowidodo, Gatot. 2015. *Komunikasi Politik dan Resolusi Konflik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Ramadhan, Bilal. 2017. *Putusan MA, Romi: Djan Faridz Sudah Tak Berhak Lagi*. Melalui <https://www.republika.co.id/berita/oroj30330/putusan-ma-romi-djan-faridz-sudah-tak-berhak-lagi> [22/7/21]
- Ridhoi, Ahsan. 2018. *Siapa Kader PPP yang Diklaim Sudrajat Saat Debat Pilgub Jabar?*. Melalui <<http://tirto.id/siapa-kader-ppp-yang-diklaim-sudrajat-saat-debat-pilgub-jabar-cF9b>> [1/2/2019]
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Waskita, Ferdinand. 2018. *Politisi PPP Ungkap Kronologi Perpecahan di Partainya*. Melalui <<https://nasional.kompas.com/read/2015/04/13/0123/Politisi.PPP.Ungkap.Kronologi.Perpecahan.di.Partainya>> [4/6/2018]
- Wulandari, F. 2017. *PPP Klaim Ada Kadernya yang Layak Mendampingi Ridwan Kamil Menuju Jabar*. Melalui, <<https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/20/ppp-klaim-ada-kadernya-yang-layak-dampingi-ridwan-kamil-menuju-jabar-1>> [1/2/19]

¹¹ Wawancara dengan Hj. Neng Madinah (Ketua DPW PPP Jabar Bid. Perempuan), tanggal & Januari 2022 melalui daring

¹² Kurnia, Ahmad Doli. 2005. *Gerakan dan Pemikiran: Nasionalisme Kaum Muda, Pasang Surut Realitas Kebangsaan Kita*. Bandung: Alfabeta.(hal.35-36)